

KLIPING **BERITA**

RABU, 21 SEPTEMBER 2022



KLIPING BERITA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Nama Media : Harian Singgalang



SIRIAH DI CARANO

Lurah Pasar Usang, Erosen Adera disambut dengan siriah di carano oleh remaja Jembes pada kegiatan peringatan HUT RI ke-77, Sabtu malam lalu. (Kominfo)

Perkim LH Imbau Masyarakat Kelola dan Pilah Sampah

PADANG PANJANG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Padang Panjang melaksanakan sosialisasi sekaligus mengimbau agar masyarakat Padang Panjang bisa mengelola dan memilah sampah dengan baik.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meminimalisir pembuangan sampah. Salah satunya dengan cara mendaur ulang sampah organik maupun an-organik. Karena saat ini tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) kita sudah memenuhi kapasitas," kata Kadis Perkim LH, Alvi Sena, saat Wirid Korpi di Masjid Islamic Center, Jumat (16/9) lalu.

Dengan penuhnya TPAS yang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat saat ini, katanya, masyarakat bisa memanfaatkan bank sampah yang sudah ada di setiap kelurahan.

"Kita sudah punya bank sampah yang bisa dimanfaatkan. Kita harap masyarakat agar memanfaatkan bank sampah ini dengan baik guna menekan sampah yang dikeluarkan," pungkasnya.

Wirid pagi itu menghadirkan Ustaz H. Khamsul Amar sebagai penceramah. Buya sepuh itu menguraikan terkait pemantapan akidah.

"Iman sangatlah penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, di dalam tubuh dan kehidupan manusia harus tertanam keimanan. Agar senantiasa selalu ingat kepada Allah SWT," sebutnya.

Setiap manusia perlu pemantapan dalam hal akidah, yang di dalamnya ada dua hal penting. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari akhir.

"Umat harus percaya adanya hari akhir. Di hari akhir akan diperhitungkan semua amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia dan surgalah sebagai imbalannya," pesannya. (205)

Setiap manusia perlu pemantapan dalam hal akidah, yang di dalamnya ada dua hal penting. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari akhir. Umat harus percaya adanya hari akhir. Di hari akhir akan diperhitungkan semua amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia dan surgalah sebagai imbalannya," pesannya.

Pemko Lepas Peserta Pelatihan Barista dan Commercial Cokery ke BBPVP Medan

PD. PANJANG - SINGGALANG

Pemko Padang Panjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) melepas empat peserta pelatihan ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Minggu (18/9) lalu.

"Empat orang ini mengikuti pelatihan di BBPVP Medan dengan jurusan barista sebanyak dua orang dan commercial

cokery sebanyak dua orang," kata Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Mardi Suntami.

Didampingi Kasi Tenaga Kerja (Naker) Hendri Febrian, Mardi Suntami menyampaikan, pelatihan dimulai 19 September, berakhir hingga satu setengah sampai dua bulan ke depan. Seluruh biaya pelatihan ditanggung BBPVP Medan.

"Mulai dari keberangkatan, biaya selama pelatihan, penginapan, konsumsi dan biaya pemulangan ditanggung BBPVP Medan. Pada 2022 ini,

BBPVP Medan dan yang lainnya tidak menyediakan uang saku bagi peserta. Tujuannya agar peserta serius mengikuti pelatihan bukan untuk mendapatkan uang saku," jelasnya.

Mardi mengharapkan peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara serius, sehingga selesai pelatihan mereka segera mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan ilmu yang diperoleh melalui usaha mandiri.

"Kenapa demikian, karena untuk mendapatkan paket pelatihan ini sangat sulit dan ber-

saing dengan daerah lainnya seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari lima BBPVP seluruh Indonesia, Kota Padang Panjang berhasil memperoleh alokasi pelatihan dari seluruh BBPVP. Dimulai dari BBPVP Semarang, Serang, Bekasi, Bandung dan terakhir Medan," ujarnya.

Kepada peserta pelatihan, dirinya meminta belajar sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyaiakan ilmu yang diperoleh. "Dan perlu diingat, jagalah nama baik Padang Panjang," pesannya. (205)

Rangkaian Kegiatan HUT RI Sukses Dimotori Remaja Jembes

Padang Panjang, Singgalang Meskipun masih tercatat sebagai pelajar sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, remaja Jembes Besi (Jembes) sukses menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di lingkungan RT 7, 8 dan 10 Kelurahan Pasar Usang (Paus).

Seperti memperingati HUT RI ke-77 dengan mengadakan acara dendang Kesenian Irama

Minang (Kim) di Jembes yang dilaksanakan Sabtu (17/9) malam. Seluruh persiapannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan semuanya dimotori remaja Jembes, tentunya dengan binaan dari orang tua dan tokoh masyarakat setempat.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Fikra Habibi menyampaikan, acara KIM ini adalah puncak dari rangkaian kemeriahan

HUT RI yang sebelumnya sudah dimulai pada 21 Agustus lalu. Berupa kegiatan berbagai jenis perlombaan dan panjat pinang yang seluruhnya digerakkan remaja Jembes.

"Pelaksanaan kegiatan malam puncak memperingati HUT RI ini agak sedikit terlambat, karena kami selaku panitia mengutamakan fokus belajar untuk ujian sekolah yang jad-

walnya pada Agustus lalu. Alhamdulillah setelah semua jadwal ujian sekolah selesai, kami bisa menyiapkan dengan matang persiapan kegiatan ini," jelas siswa SMAN 2 Padang Panjang itu.

Lurah Paus, Erosen Adera yang turut pada malam itu menyampaikan kekagumannya atas pemikiran dan kerja sama remaja Jembes sehingga bisa

menyajikan acara besar seperti ini. "Kelurahan Paus sangat bangga memiliki generasi seperti remaja Jembes yang menjadi penggerak setiap even kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial maupun kegiatan agama dengan remaja masjidnya. Ini harus tetap dipertahankan dan diteruskan ke generasi berikutnya," puji Adera.

Seluruh biaya rangkaian

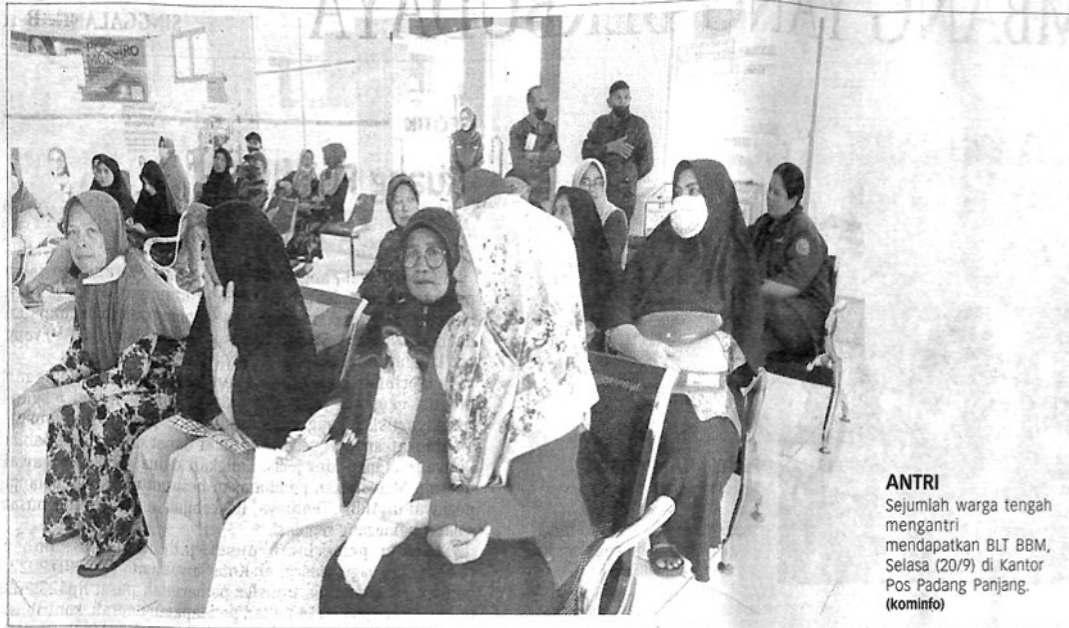
kegiatan ini bersumber dari sumbangan masyarakat khususnya warga Jembes dan tokoh masyarakat Kota Padang Panjang yang semuanya dilakukan kelompok remaja ini.

Turut hadir pada kegiatan ini, mantan Lurah Paus, Dafri Sutan Mantari dan Nofebrianto, keluarga besar Amai Jembes, serta tokoh masyarakat lainnya. (205)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Singgalang



ANTRI
Sejumlah warga tengah mengantri mendapatkan BLT BBM, Selasa (20/9) di Kantor Pos Padang Panjang. (Kominfo)

Masyarakat Padang Panjang Kembali Terima BLT BBM dan Program Sembako

PD. PANJANG - SINGGALANG

Masyarakat Kota Padang Panjang kembali menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Program Sembako periode September, Selasa (20/9). Kali ini, bantuan diterima sebanyak 162 orang warga.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Osman Bin Nur menyampaikan, ini adalah tambahan susulan penerima BLT sebagai pengalihan subsidi BBM ditambah dengan bantuan Program Sembako.

"Masyarakat menerima BLT BBM sekaligus sembako sebanyak 162 penerima. Dengan rincian untuk BLT BBM diberikan dua bulan sekaligus (September dan Oktober) dengan total Rp300 ribu, serta

Rp200 ribu bantuan sembako," terang Osman.

Dikatakan, bantuan disalurkan untuk warga Padang Panjang Barat (PPB) dan untuk warga Padang Panjang Timur (PPT). Bantuan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memulihkan ekonomi pasokan harga BBM.

Selain bantuan hari ini, Rabu (21/9) ini juga akan disalurkan BLT BBM untuk 193 penerima. Mereka hanya menerima BLT BBM tidak dengan Program Sembako. "Untuk

besok 193 penerima hanya mendapatkan BLT BBM dua bulan dengan total Rp300 ribu," kata Osman.

Sementara itu Ketua Satgas PT. Pos Padang Panjang, Eva menyampaikan, pihaknya mengatur jadwal untuk masyarakat penerima BLT BBM dan Program Sembako ini. "Khusus hari ini 162 masyarakat dan besok 193 penerima," katanya.

Untuk data penerima, ada verifikasi dari pekerja sosial masyarakat (PSM). Jika ada masyarakat yang

menerima sudah meninggal dengan KK tunggal itu, tidak akan disalurkan. Namun bagi masyarakat yang pindah tapi namanya terdaftar bisa dibayarkan asalkan yang bersangkutan langsung komunikasi dengan pihak Pos, boleh melalui telepon ataupun video call.

"Bagi penerima diwajibkan membawa KTP asli dan jika diwakilkan membawa KK asli dan silahkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," pungkasnya. (205)

TERPILIH SECARA AKLAMASI

Heri Selfiarman Pimpin LPM Padang Panjang Timur

PD. PANJANG - Heri Selfiarman Datuak Mangkuto Rajo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) periode 2022-2027, melalui musyawarah cabang, Senin (19/9) di aula kantor camat setempat.

Muscab dilaksanakan menyusul berakhirnya masa jabatan ketua dan pengurus sebelumnya. Muscab dibuka Ketua DPD LPM Kota Padang Panjang, Novi Hendri dan dihadiri LPM kelurahan se-Padang Panjang Timur.

Heri menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. "Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan DPC LPM bisa makin bersinergi dengan pemerintah sebagai mitra mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat khususnya warga PPT," ujarnya.

Sementara itu, Novi Hendri mengapresiasi terpilihnya Heri. "Pemilihan ini terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Peserta yang memiliki hak suara dari LPM Kelurahan, DPC dan DPD sepakat memilih satu nama Heri Selfiarman," katanya.

Dikatakannya lagi, pelaksanaan pemilihan tersebut berjalan lancar. Semua seayun selangkah menjalankan roda administrasi. "Hal yang sangat positif di LPM PPT. Selamat kepada Bapak Heri. Kita berharap bisa mengemban amanah ini sebaik mungkin," sebutnya.

Novi berharap Heri hendaknya bisa lebih memperkuat kelembagaan LPM ini sampai ke tingkat kelurahan. "Yang penting bisa bersinergi dengan Bapak Camat dan jajaran. Karena LPM adalah mitra pemerintah," ungkapnya. (205)



TERPILIH - Ketua DPC LPM Kecamatan Padang Panjang Timur terpilih, Heri Selfiarman berfoto dengan Ketua DPD LPM Kota Padang Panjang, Novi Hendri. (Kominfo)



Nama Media : Harian Singgalang

(214)

Wakota Pd. Panjang Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2022

Pd. Panjang, Singgalang

Walikota H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano menyampaikan Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 dan Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/9) di ruang sidang DPRD setempat.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbrali itu dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, anggota DPRD, asisten dan staf Ahli, kepala OPD, camat, lurah serta undangan lainnya.

Wako Fadly mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan Pendapatan Daerah dalam perubahan APBD ini. Antara lain penyesuaian terhadap beberapa ketentuan terkait kebijakan perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah, serta perubahan alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah.

Secara keseluruhan

Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp770.616.636 atau naik 0,14% dari Rp541.419.707.666 sebelum perubahan menjadi Rp542.190.324.302. Kenaikan pendapatan terjadi pada alokasi Pendapatan Transfer.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan target sebesar Rp7.014.832.664 yakni dari Rp92.304.833.666 sebelum perubahan menjadi Rp85.290.001.002.

Adapun penurunan tersebut terjadi pada pajak daerah diproyeksikan bertambah Rp650 juta dari semula Rp9.853.200.000 menjadi Rp10.503.200.000. Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp300 juta atau turun dari semula Rp5.640.800.000 menjadi Rp5.340.800.000.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terjadi pengurangan sebesar Rp264.824.996 dari Rp6.829.893.666 menjadi Rp6.565.068.670.

Lain-lain PAD yang Sah terjadi penurunan sebesar Rp7.100.007.668 yakni dari Rp69.980.940.000 menjadi Rp62.880.932.332. Penurunan target ini terutama terjadi karena penurunan target penerimaan pada BLUD RSUD

sebesar Rp8 miliar.

Sedangkan pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp7.785.449.300 dari semula sebesar Rp446.104.874.000 menjadi Rp453.890.323.300. Naiknya pendapatan transfer ini terjadi pada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta pendapatan transfer antardaerah.

"Berdasarkan estimasi di atas, maka kebijakan umum pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2022, perlu adanya pem-

baruan data pajak dan retribusi daerah.

Dalam mengoptimalkan intensifikasi dan eksensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu mengembangkan inovasi dan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara elektronik yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)," papar Fadly.

Selain itu, tambahnya, melakukan evaluasi ter-

hadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Lalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.

"Juga mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat," sebutnya.

Selain itu, Fadly juga menyampaikan permasalahan utama Belanja Daerah, antara lain terjadinya inflasi secara global yang juga mempengaruhi perekonomian nasional.

Secara keseluruhan Belanja Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp7.837.255.804,47 dari semula Rp599.879.707.666 menjadi Rp607.716.963.470,47. Namun pada kelompok Belanja Modal turun sebesar Rp1.729.382.723,70 yaitu dari Rp75.105.267.402 sebelum perubahan menjadi Rp73.375.884.678,30 setelah perubahan. (205)



SERAHKAN NOTA KEUANGAN - Walikota Fadly Amran menyerahkan nota keuangan Perubahan APBD 2022 kepada Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar, Senin (19/9) di ruang sidang DPRD setempat. (kominfo)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Posmetro Padang

Adaptasi Perubahan Tata Kelola Keuangan

Pemko Sampaikan Ranperda ke DPRD

UBAHAN APBD KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN NOT
TERHADAP RANPERDA KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGELOLAAN



NOTA KEUANGAN— Wakil Kota Padang Panjang, Fadly Amran menyerahkan nota keuangan perubahan APBD 2022 kepada Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar.

PDG. PANJANG, METRO
Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah. Sehingga perlu ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan. Hal itu disampaikan Wakil Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano saat menyampaikan Nota Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam paripurna DPRD, Senin (19/

9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E di Ruang Sidang DPRD.
Wako Fadly menjelaskan, perubahan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. Di mana sebelumnya belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Sedangkan saat ini di-

klasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer. Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan. Khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah.

“Perubahan yang ada, dimaksudkan agar keuangan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah

serta melakukan pinjaman. Dijelaskan Fadly, untuk pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah,” sebutnya. (rmd)

Kejari Musnahkan Barang Bukti Sitaan 12 Perkara

PADANG PANJANG, METRO

Barang Bukti (BB) hasil sitaan dari 12 perkara tindak pidana umum dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari), Selasa (20/9), di halaman Kantor Kejari.
Pemusnahan yang dilakukan yaitu narkotika dengan cara diblender hingga tidak mungkin untuk dikonsumsi lagi. BB lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan ini turut disaksikan pihak Kepolisian, TNI, Rumah Tahanan, Pengadilan dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemko.
Kepala Kejari yang diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), Rahmat Nurhidayat, S.H menyebutkan, pemusnahan BB ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah pada hari ini dengan disaksikan satgas terkait, kita melaksanakan pemusnahan BB yang proses hukumnya sudah selesai. Adapun BB tersebut yaitu berupa sabu-sabu, ganja, dan BB tindak pidana umum seperti kasus pencabulan dan lain lain,” tuturnya. (rmd)

Lagi, Warga Terima IBLT BBM dan Sembako

PDG. PANJANG, METRO
Masyarakat Padang Panjang kembali terima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Program Sembako periode September. Hari ini, Selasa (20/9), sebanyak 162 warga menerima bantuan sosial (bansos) itu.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan, ini adalah

tambahan-susulan penerima BLT sebagai pengalihan subsidi BBM ditambah dengan bantuan Program Sembako.
“Masyarakat menerima BLT BBM sekaligus sembako sebanyak 162 penerima. Dengan rincian untuk BLT BBM diberikan dua bulan sekaligus (September dan Oktober) dengan total Rp300 ribu, serta Rp200 ribu bantuan sembako,” terang Osman.
Dikatakan, bantuan disalurkan untuk warga Pa-

dang Panjang Barat (PPB) dan untuk warga Padang Panjang Timur (PPT). Bantuan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memulihkan ekonomi pascakenaikan harga BBM.
Selain bantuan hari ini, besok (21/9) juga akan disalurkan BLT BBM untuk 193 penerima. Mereka hanya menerima BLT BBM tidak dengan Program Sembako. “Untuk besok 193 penerima hanya mendapatkan BLT BBM dua bulan

dengan total Rp300 ribu,” kata Osman.
Sementara itu Ketua Satgas PT. Pos Padang Panjang, Eva Menyampaikan, pihaknya mengatur jadwal untuk masyarakat penerima BLT BBM dan Program Sembako ini. “Khusus hari ini 162 masyarakat dan besok 193 penerima,” katanya.
Untuk data penerima, ada verifikasi dari pekerja sosial masyarakat (PSM). Karena jika ada masyarakat yang menerima su-

dah meninggal dengan KK tunggal itu tidak akan disalurkan. Namun bagi masyarakat yang pindah tapi namanya terdaftar bisa dibayarkan asalkan yang bersangkutan langsung komunikasi dengan pihak Pos, boleh melalui telepon ataupun video call.
“Bagi penerima diwajibkan membawa KTP asli dan jika diwakilkan membawa KK asli dan silahkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (rmd)

Dibuka Wako Fadly Amran Padang TV Gelar Lomba Cerdas Quran

PDG. PANJANG, METRO
Padang TV menggelar Lomba Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Panjang yang diikuti sebanyak 75 grup peserta. Kegiatan yang kedua kalinya dilaksanakan ini, dibuka Wakil Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Selasa (20/9), di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Informasi yang dihimpun, lomba berlangsung selama tiga hari. Dua hari untuk babak penyisihan, satu hari babak final pada Kamis (22/9) lusa. Adapun materi Cerdas Qur'an di antaranya sambung ayat, terjemahan Al Qur'an, Sejarah Islam, Pendidikan Agama Islam, serta ber-

bagai materi lainnya.
Wako Fadly dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan lomba ini guna menumbuhkan nilai-nilai kecintaan terhadap Qur'an dan terus mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan Padang Panjang sebagai kota literasi. “Literasi artinya belajar, belajar berbagai bidang keilmuan,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan lomba ini memiliki dampak positif, lantaran sejak usia dini diajarkan berkompetisi. Lalu, menunjukkan Padang Panjang layak sebagai Kota Pendidikan.
“Sebagai Kota Pendidikan dari segi lintas ilmu seharusnya kita juara. Esensi dari lomba ini bisa dilaksanakan secara baik, men-



SAMBUTAN— Wakil Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, berikan sambutan ssat membuka Lomba Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Panjang.

paian anak-anak kita, di peringkat mana,” katanya.
Lebih lanjut, Fadly berharap lomba ini bisa dilaksanakan secara baik, men-

jadi evaluasi pencapaian murid. “Kalau pun kalah, itu biasa. Merupakan kemenangan yang tertunda. Tetapi menjadi evaluasi

bagi bapak dan ibu guru, para pembina, sejauh mana dibandingkan dengan sekolah lainnya,” ungkapnya. (rmd)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



WAKIL Ketua DPRD Yulius Kaisar ketika membuka Rapat Paripurna DPRD Kota Padangpanjang Tentang Perubahan APBD Kota Padangpanjang Tahun 2022.

BPS Gelar Pendataan Awal Regsosek

Silaing Bawah, Rakyat Sumbar—Walikota Padangpanjang Fadly Amran mengapresiasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Padangpanjang.

"Saya juga berterima kasih dengan adanya pendataan ini. Dengan pendataan ini akan membuat pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam mendata masyarakat yang memerlukan bantuan. Serta hal-hal penting lainnya menyangkut perekonomian masyarakat," ucap Fadly saat Rapat Regsosek di Auditorium Mifan Waterpark, Selasa (20/9).

Fadly bersyukur dengan adanya instruksi dari presiden terkait pendataan ini. Sebab ini adalah hal yang penting dalam mendaftarkan masyarakat miskin yang berada di Kota Padangpanjang serta memudahkan Pemko dalam mendata pembagian BLT kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat, Ir. Herum Fajarwati, M.M. menuturkan, pendataan ini akan membantu untuk mengelompokkan penduduk ke dalam berbagai sisi khususnya segi ekonomi.

"Kita berharap tidak hanya dari segi ekonomi, bahkan hingga pendidikan. Ini dapat membantu pembangunan masyarakat Indonesia untuk ke depannya" ucap Herum.

Perlu diketahui bahwa Regsosek ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan lebih efisien.

"Insyaa Allah kegiatan ini akan dimulai pada 15 Oktober sampai dengan 14 November mendatang," tuturnya. (ned)



WALIKOTA Padangpanjang Fadly Amran menyaksikan Kapolres Padangpanjang menandatangani Piagam Dukungan Regsosek 2022 yang dilaksanakan BPS Kota Padangpanjang.



WALIKOTA Padangpanjang Fadly Amran menyerahkan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar didampingi Imbral.

Pemko Ajukan Ranperda Tata Kelola Keuangan ke DPRD

Padangpanjang, Rakyat Sumbar — Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah. Sehingga perlu ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan.

Hal itu disampaikan Walikota Padangpanjang Fadly Amran saat menyampaikan Nota Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E di Ruang Sidang DPRD.

Wako Fadly menjelaskan, perubahan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. Dimana sebelumnya belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Sedangkan saat ini diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.

Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan. Khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah.

"Perubahan yang ada, dimaksudkan agar keuangan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan

masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Dijelaskan Fadly, untuk pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

"Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah," sebutnya. (ned)

Target PAD dari BLUD SUD Berkurang

Walikota Padangpanjang Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD

PENYAMPAIAN tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD, Senin (19/9) dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E. Turut hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P. M.Si, anggota DPRD, asisten dan staf Ahli, kepala OPD, camat, lurah serta undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Fadly menyebutkan, terdapat permasalahan pendapatan daerah dalam perubahan APBD ini. Antara lain penyesuaian terhadap beberapa ketentuan terkait kebijakan perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah, serta perubahan alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp770.616.636 atau naik 0,14% dari Rp541.419.707.666 sebelum perubahan menjadi Rp 542.190.324.302. Kenaikan pendapatan terjadi pada alokasi Pendapatan Transfer.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan target sebesar Rp7.014.832.664 yakni dari Rp92.304.833.666 sebelum perubahan menjadi Rp-85.290.001.002.

Adapun penurunan tersebut terjadi pada pajak daerah diproyeksikan bertambah Rp650 juta dari semula Rp-9.853.200.000 menjadi Rp10.503.200.000. Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp300 juta atau turun dari semula Rp5.640.800.000 menjadi Rp-5.340.800.000. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terjadi pengurangan sebesar Rp264.824.996 dari Rp6.829.893.666 menjadi Rp-6.565.068.670. Lain-lain PAD yang Sah terjadi penurunan sebesar Rp7.100.007.668 yakni dari Rp69.980.940.000 menjadi Rp62.880.932.332. Penurunan target ini terutama terjadi karena penurunan target penerimaan pada BLUD RSUD sebesar Rp8 miliar.

Sedangkan pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp7.785.449.300 dari semula sebesar Rp446.104.874.000 menjadi Rp-453.890.323.300. Naiknya pen-

JON KENEDI
Harian Rakyat Sumbar

Walikota Padangpanjang Fadly Amran sampaikan Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2022 dan Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

dapatan transfer ini terjadi pada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta pendapatan transfer antardaerah.

"Berdasarkan estimasi, maka kebijakan umum pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2022, yaitu adanya pembaruan data pajak dan retribusi daerah. Dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan OPD, perlu mengembangkan inovasi dan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara elektronik yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKD," papar Fadly.

Selain itu, tambahnya, melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Lalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.

"Juga mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat," sebutnya.

Selain itu, Fadly juga menyampaikan permasalahan utama Belanja Daerah, antara lain terjadinya inflasi secara global yang juga mempengaruhi perekonomian nasional.

Secara keseluruhan belanja daerah diproyeksikan naik sebesar Rp7.837.256.804,47 dari semula Rp599.879.707.666 menjadi Rp607.716.963.470,47. Namun pada kelompok belanja modal turun sebesar Rp1.729.382.723,70 yaitu dari Rp75.105.267.402 sebelum perubahan menjadi Rp73.375.884.678,30 setelah perubahan. (ned)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

Kejari Padangpanjang Musnahkan BB Sitaan

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangpanjang memusnahkan Barang Bukti (BB) hasil sitaan dari 12 perkara tindak pidana umum dimusnahkan di halaman kantor Kejari setempat, Selasa (20/9).

Pemusnahan yang dilakukan yaitu narkotika dengan cara di-blender hingga tidak mungkin untuk dikonsumsi lagi. BB lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Kepala Kepolisian, TNI, Rumah Tahanan, Pengadilan dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemko.

Kepala Kejari yang diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), Rahmat Nurhidayat menyebutkan, pemusnahan BB ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan.

"Allhamdulillah pada hari ini dengan disaksikan satgas terkait, kita melaksanakan pemusnahan BB yang proses hukumnya sudah selesai. Adapun BB tersebut yaitu berupa Sabu, Ganja dan BB tindak pidana umum seperti kasus pencabulan dan lain lain," tuturnya. (ned)



Pemusnahan barang bukti narkoba yang dilaksanakan Kejari Padangpanjang di halaman Kejari setempat, Selasa kemarin



Nama Media : Harian Khazanah

DIBUKA WAKO FADLY AMRAN

Padang TV Gelar Lomba Cerdas Qur'an



LOMBA – Suasana Lomba Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Panjang. (Foto : Paulhendri)

Padang Panjang, *Khazanah*—Al Quran adalah cahaya yang akan memandu manusia untuk menemukan jalan kebenaran di tengah kegelapan. Siapa pun yang menjadikan Al Quran sebagai panduan hidup, tidak ada yang akan ia dapat kan, selain kemuliaan yang sejati (QS. al-Anbiya:10). Namun sebaliknya, siapapun yang berpaling dari Al Quran, Allah Ta'ala akan memberikan aneka kesempitan dalam hidupnya (QS. Thaha: 124).

Bagaimana mungkin seseorang bisa menjalani hidup dengan baik, bahagia, dan lurus sehingga bisa mencapai ke tempat tujuan apabila ia tidak mengenal atau tidak memahami petunjuk dan peta yang dianugerahkan oleh pemilik dunia. Kedekatan dengan Al Quran dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang Muslim. Jadi kita semua harus cerdas dengan Al Quran, dan banyak aktifitas dengan Al Quran seperti di Kota Padang Panjang yang kini disemarakkan.

Hal itu dikatakan WaliKota, H. Fadly Amran, BBA saat membuka Lomba Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Panjang yang diikuti sebanyak 75 grup peserta, Selasa (20/9), di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Informasi yang dihimpun, lomba berlangsung selama tiga hari. Dua hari untuk

babak penyisihan, satu hari babak final pada Kamis (22/9) lusa. Adapun materi Cerdas Qur'an di antaranya sambung ayat, terjemahan Al Qur'an, Sejarah Islam, Pendidikan Agama Islam, serta berbagai materi lainnya.

Wako Fadly dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan lomba ini guna menumbuhkan nilai-nilai kecintaan terhadap Qur'an dan terus mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan Padang Panjang sebagai kota literasi.

"Literasi artinya belajar, belajar berbagai bidang keilmuan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan lomba ini memiliki dampak positif, lantaran sejak usia dini diajarkan berkompetisi. Lalu, menunjukkan Padang Panjang layak sebagai Kota Pendidikan.

"Sebagai Kota Pendidikan dari segi lintas ilmu seharusnya kita juara. Esensi dari lomba ini mengetahui sejauh mana pencapaian anak-anak kita, di peringkat mana," katanya.

Lebih lanjut, Fadly berharap lomba ini bisa dilaksanakan secara baik, menjadi evaluasi pencapaian murid.

"Kalaupun kalah, itu biasa. Merupakan kemenangan yang tertunda. Tetapi menjadi evaluasi bagi bapak dan ibu guru, para pembina, sejauh mana dibandingkan dengan sekolah lainnya," ungkapnya. ■ paulhendri



Nama Media : Harian Koran Padang

Kejari Padang Panjang Musnahkan Barang Bukti Sitaan 12 Perkara

PADANG PANJANG, KP - Barang bukti hasil sitaan dari 12 perkara tindak pidana umum dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang, Selasa (20/9). Barang bukti yang dimusnahkan yaitu narkoba dengan cara diblender dan barang bukti lainnya dengan cara dibakar.

Kegiatan ini turut dihadiri pihak kepolisian, TNI, rumah tahanan, pengadilan, dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemko Padang Panjang.

Kepala Kejari Padang Panjang diwakili Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), Rahmat Nurhidayat menyebut, barang bukti yang dimusnahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, barang bukti yang dimusnahkan itu antara lain sabu-sabu, ganja, dan barang bukti tindak pidana umum seperti kasus pencabulan dan lain sebagainya. (sup)

Masyarakat Kembali Terima BLT BBM dan Program Sembako

PADANGPANJANG, KP - Masyarakat Padangpanjang kembali terima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Program Sembako periode September. Hari ini (kemarin-red), Selasa (20/9) sebanyak 162 warga menerima bantuan sosial (bansos) itu.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak, Osman Bin Nur menyampaikan, ini adalah tambahan usulan penerima BLT sebagai pengalihan subsidi BBM ditambah dengan bantuan program sembako.

"Masyarakat menerima BLT BBM sekaligus sembako sebanyak 162 penerima. Dengan rincian untuk BLT BBM diberikan dua bulan sekaligus (September dan Oktober) dengan total Rp300 ribu; serta Rp200 ribu bantuan sembako," terang Osman.

Dikatakan, bantuan disalurkan untuk warga Padang Panjang Barat (PPB) dan untuk warga Padang Panjang Timur (PPT). Bantuan ini dilakukan

sebagai langkah strategis untuk memulihkan ekonomi pascakenaikan harga BBM.

Selain itu, besok (hari ini-red) Rabu (21/9) juga akan disalurkan BLT BBM untuk 193 penerima. Mereka hanya menerima BLT BBM tidak dengan program sembako.

"Untuk besok 193 penerima hanya mendapatkan BLT BBM dua bulan dengan total Rp300 ribu," kata Osman.

Sementara itu Ketua Satgas PT. Pos Padangpanjang, Eva menyampaikan, pihaknya mengatur jadwal untuk masyarakat penerima BLT BBM dan Program Sembako ini. "Khusus hari ini (kemarin-red) 162 masyarakat dan besok 193 penerima," katanya.

Untuk data penerima, ada verifikasi dari pekerja sosial masyarakat (PSM). Karena jika ada masyarakat yang menerima sudah meninggal dengan KK tunggal itu tidak akan disalurkan. Namun bagi masyarakat yang pindah tapi namanya terdaftar bisa dibayarkan asalkan yang bersang



MASYARAKAT Padangpanjang kembali terima BLT BBM dan Program Sembako periode September 2022.

kutan langsung komunikasi dengan pihak Pos, boleh melalui telepon ataupun video call.

"Bagi penerima diwajibkan membawa KTP

asli dan jika diwakilkan membawa KK asli dan silahkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," pungkasnya. (sup)



Nama Media : Harian Koran Padang

316 Mahasiswa ISI Diwisuda

PADANG PANJANG, KP - Sebanyak 316 mahasiswa Strata I dan Strata II Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang ikuti wisuda periode I 2022/2023, di Gedung Hoeridjah Adam, Senin (19/9).

Wisuda ini dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yas Edizarwin bersama Kapolres AKBP Donny Bramanto dan istri, Kepala Kejaksaan Negeri Nilma, unsur forkopimda lainnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Elfan, serta undangan lainnya.

Total 319 mahasiswa itu terdiri dari 24 mahasiswa Strata II Penciptaan dan Pengkajian Seni. Strata I Fakultas Seni Pertunjukan terdiri dari Program Studi Seni Karawitan (25 orang), Seni Tari (61 orang), Seni Musik (27 orang), Seni Teater (6 orang) dan Antropolgi Budaya (16 orang).

Untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, di antaranya Prodi Kriya Seni (14 orang), Televisi dan Film (53 orang), Seni Murni (10 orang), Fotografi (27 orang), Desain Komunikasi Visual (43 orang) dan Pendidikan Kriya (10 orang).

Rektor ISI Prof Novesar Jamarun mengatakan, pengembalian mahasiswa yang sudah diwisuda

kepada orang tua tidak dimaknai dengan kembali untuk terus berlingung di bawah pangkuannya. Namun untuk memberikan kebahagiaan dengan menunjukkan kesuksesan dan keberhasilan.

"Kami percaya dan yakin, saudara akan dapat berkontribusi dan berbaur di lingkungan. Pengalaman dan bekal ilmu yang dimiliki, perlu dikolaborasi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja," ujarnya.

Di masa jabatan terakhirnya ini, Novesar juga mengucapkan pamit kepada semua mahasiswa dan civitas akademika. Ia meminta maaf jika selama masa jabatannya sebagai rektor ada kekurangan.

Sementara, Yas Edizarwin dan forkopimda yang hadir juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang diwisuda. Ia berharap, ISI terus melakukan kerja sama dengan Pemko dalam menghasilkan generasi emas untuk kejayaan bangsa.

Pada acara ini, 12 mahasiswa lulusan terbaik menyanyikan lagu 'Jaso Mande' dengan orang tuanya masing-masing. (sup)



SEBANYAK 316 mahasiswa ISI Padangpanjang mengikuti wisuda periode I 2022/2023



Nama Media : Mingguan Bidik Kasus

Dinilai Telah Penuhi Kriteria, Pemko Persiapkan Penilaian Adipura

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)



Padang Panjang - Guna mempersiapkan penilaian Adipura 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) menggelar rapat bersama pihak terkait, di

Hall Lantai III Balai Kota, Rabu (14/9).

Keikutsertaan kota dalam penilaian Adipura 2022 ini diwajibkan karena sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Di mana sebel-

umnya penilaian Adipura ini diserahkan kepada kabupaten/kota yang mau saja.

Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si saat memimpin rapat mengharapkan kepada semua kepala sekolah maupun lurah yang menjadi objek penilaian untuk dapat membenahi objek-objek yang sudah ditunjuk. "Kami melihat ada masih banyak objek yang memiliki nilai rendah. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk membenahi objek ini," ujarnya.

Ia juga meminta Perkim LH untuk menurunkan tim yang ditugaskan melakukan

pemantauan setiap hari pada objek-objek yang masih memiliki nilai rendah dan mengerahkan semua anggota dalam pembenahan tersebut. Penilaian Adipura Tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah dimulai pada 1 September lalu. Kota Padang Panjang diperkirakan berada pada penilaian cluster 4 yang kemungkinan akan dinilai mulai pada 20 September mendatang.

Sedangkan untuk Pra Pantau Adipura Kota akan kembali melakukan pengecekan ulang ke titik pantau pada 19 September.

Pemko Siapkan Tiga Langkah Penanggulangan Inflasi

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)

Padang Panjang - Pemerintah Kota menyiapkan tiga langkah penanggulangan inflasi sertaantisipasi dampaknya terhadap masyarakat. Yaitu Gerakan Tanam Cabai, subsidi tarif angkutan dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Hal tersebut disampaikan

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Zulkifli, S.H didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (SDA) Setdako, Putra Dewangga, SS M.Si, usai melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian

BERSAMBUNG KE HAL ► 11



Dokter Dian Kunjungi Anak-Anak PAUD Dan Sosialisasikan Stunting

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)

Padang Panjang - Ketua TP PKK Padang Panjang dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP kembali turun lapangan mengunjungi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang ada di Kota Padang Panjang.

Kali ini bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dokter Dian berkesempatan untuk mengunjungi PAUD Puti Bungsu dan Posyandu Permata Bunda di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu (14/9).

Pada kesempatan tersebut, selain bertemu dan bermain dengan anak-anak PAUD yang begitu gembira menyambungnya, Dian juga memberikan sosialisasi stunting bagi guru PAUD dan kader PKK yang ada di kelurahan tersebut, serta para orang tua murid untuk bersama-sama melakukan pencegahan dalam permasalahan stunting.

Dikatakan Dian, stunting pada anak

mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak lima tahun (balita). Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan, hingga usia dua tahun. Secara fisik, balita stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Pelayanan penurunan angka stunting, lanjut Dian, telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui beberapa aksi dan program yang melibatkan beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lembaga terkait lainnya meliputi pelayanan perbekalan edukasi stunting. "Adapun upaya-upaya dalam penanggulangan/pencegahan stunting di lingkup PAUD yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas PAUD dengan program dalam pencegahan stunting," sebut Bunda PAUD Padang Panjang itu.

Pemko Siapkan Tiga Langkah Penanggulangan

Inflasi Tahun 2022 secara daring, Rabu (14/9).

"Ke depan kita juga perlu melakukan sinergi dengan daerah lain berkaitan dengan penanggulangan inflasi. Beberapa daerah menjadi penyuplai bahan pokok. Jadi diharapkan ada kerja sama mengatasi terjadinya inflasi," ungkap Zulkifli.

Sementara itu Putra Dewangga mengatakan, melalui Gerakan Tanam Cabai, Pemko memberikan bibit cabai kepada seluruh Kelompok Wanita Tani (KWT). "Ada pembinaan

dan reward di situ. Bertanam cabai ada tekniknya. Jadi KWT dipercaya mampu mengolah itu. Diharapkan produksi cabai bisa meningkat. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kelangkaan cabai," ujarnya.

Terkait subsidi tarif angkutan, lanjut Putra, diberikan kepada pengusaha angkutan kota Padang Panjang dengan menutup tambahan tarif yang timbul sebagai dampak kenaikan harga BBM. "Besaran subsidi (tambahan tarif) ditetapkan berdasarkan hasil analisis

Dinas Perhubungan terhadap kenaikan tarif angkutan kota yang diusulkan oleh Organda. Mengingat keterbatasan anggaran, maka angkutan perbatasan tidak diberi subsidi," jelasnya.

Selanjutnya, BST dari APBD diberikan pada masyarakat terdampak inflasi, termasuk ojek dan UMKM. Prioritas pertama penerima BST yaitu penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lalu, prioritas kedua, penduduk yang termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tidak menerima BST, BSU (Bantuan Subsidi Upah) ataupun BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) dari pusat. Dalam satu KK (Kepala Keluarga) hanya bisa menerima satu jenis bantuan. "Untuk Gerakan Tanam Cabai sudah kita mulai. Langkah berikutnya ialah pemberian subsidi tarif angkutan dan BST. Ini akan segera kita laksanakan," tuturnya.

KLIPING BERITA



Kominfo Padang Panjang



Jalan Prof. M. Yamin Nomor 2



diskominfo.padangpanjang@gmail.com